SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities (2024), Vol.1 Issue.2 pp. 93-102
doi: XXX
ESPublisher

DANA DESA DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKOSARI KECAMATAN SUKOWONO

Basilius Kaikimbinop *[1], Itok Wicaksono[2]
[1,2,] Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, UNMUH Jember, Jember, Jawa Timur - Indonesia

Corresponding author: Basilius Kaikimbinop (basbasiliusbas69@gmail.com)

Article Information: submission received XXX; revision: XXX; accepted XXX; first published online XXX

Abstract
Desa Sukosari, yang terletak di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 531,888 hektar dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Meskipun berpotensi besar, kondisi sosial ekonomi masyarakat desa ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Sukosari. Fokus utama terletak pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dana desa di Desa Sukosari menghadapi berbagai tantangan, termasuk aspek pengelolaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Manajemen yang baik dari dana desa sangat penting untuk memastikan efektivitas program-program yang dirancang untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai juga menjadi penentu keberhasilan program ini. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, beberapa langkah perbaikan direkomendasikan, antara lain: penciptaan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa, dan peningkatan layanan kesehatan melalui program puskesmas keliling serta perluasan infrastruktur kesehatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Desa Sukosari dapat mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan yang kompleks, dengan pengelolaan dana desa yang efektif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur, Desa Sukosari memiliki potensi besar untuk memperbaiki kondisi sosial ekonominya. Implementasi yang tepat akan membuka jalan bagi kemajuan desa, menjadikan Desa Sukosari contoh bagi desa-desa lain dalam optimalisasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Keywords: Implementasi Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat; Kesejahteraan Sosial Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Desa Sukosari di Jember, Jawa Timur, terletak di wilayah yang subur dan ideal untuk pertanian. Tanahnya yang subur dan iklim yang mendukung memungkinkan pertanian di desa ini berkembang dengan baik. Hasil pertanian utama meliputi padi, tembakau, kopi, dan

sayuran seperti kacang panjang dan kacang tanah. Selain itu, desa ini juga dikenal dengan perkebunan buah-buahan seperti durian, mangga, dan rambutan yang tumbuh dengan baik di sini (Abdurahman, 2023; Qadafi, 2023; El Muhammady, 2023).

Mayoritas penduduk Desa Sukosari adalah Muslim, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan tradisi sosial mereka. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya, memperkuat nilai-nilai keagamaan dan solidaritas dalam masyarakat. Selain itu, adat istiadat dan tradisi lokal masih dijaga dengan baik, mencerminkan kekayaan budaya yang ada di desa ini.

Potensi ekonomi Desa Sukosari tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, tetapi juga meliputi peternakan. Peternakan sapi potong dan sapi perah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi penduduk desa. Selain itu, potensi pariwisata juga semakin diperhatikan dan dikembangkan. Keindahan alam desa yang masih alami, dikelilingi perbukitan hijau dan sungai yang jernih, menawarkan potensi yang besar untuk pariwisata alam dan ekowisata. Penduduk setempat mulai mengembangkan homestay dan tempat wisata pedesaan untuk menarik wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan kehidupan pedesaan (Rokhani, 2023).

Desa Sukosari memiliki kesempatan besar untuk terus berkembang dengan berbagai potensi ekonomi yang dimilikinya. Pemerintah setempat, bersama dengan kerja keras masyarakat, terus mengembangkan infrastruktur dan memperbaiki aksesibilitas ke desa ini. Visi untuk mengintegrasikan pertanian modern, pariwisata berkelanjutan, dan kearifan lokal dalam pengembangan desa menjadi kunci utama dalam meraih masa depan yang lebih baik untuk Desa Sukosari dan penduduknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal yang berperan dalam implementasi dana desa di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Faktor internal ini meliputi kesiapan administrasi desa dalam mengelola dana, kapasitas SDM yang terlibat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Selain faktor internal, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor eksternal yang memengaruhi implementasi dana desa. Faktor eksternal ini mencakup dukungan atau hambatan dari pemerintah daerah, kebijakan nasional terkait pengelolaan dana desa, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana (Astika, 2022; Digdowiseiso, 2023).

Pada aspek pemberdayaan masyarakat, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan di Desa Sukosari. Bentuk-bentuk pemberdayaan ini dapat mencakup program pelatihan, pengembangan keterampilan, pembangunan infrastruktur sosial ekonomi, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi efektivitas implementasi dana desa serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan masyarakat Desa Sukosari dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa serta mengoptimalkan manfaatnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami implementasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukosari. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi faktor internal yang mempengaruhi proses implementasi dana desa di tingkat desa tersebut. Faktor-faktor seperti kesiapan administrasi desa dalam mengelola dana, kapasitas SDM yang terlibat, dan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana akan dianalisis secara mendalam.

Selain faktor internal, penelitian ini juga menyoroti faktor eksternal yang turut memengaruhi implementasi dana desa di Desa Sukosari. Dukungan atau hambatan yang diberikan oleh pemerintah daerah, kebijakan nasional terkait pengelolaan dana desa, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana akan menjadi bagian dari analisis yang komprehensif.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengulas mengenai implementasi dana desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia (Bonso, 2023; Astika, 2022; Yasin, 2021; Rismayanti, 2022; Firdausa, 2022; Sihotang, 2022; Maulana, 2022) Namun, penelitian ini penting karena memberikan fokus khusus pada konteks dan realitas yang unik di Desa Sukosari. Dengan mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dana desa di desa ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan spesifik tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih terarah bagi pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan masyarakat Desa Sukosari untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang kuat dalam konteks pengelolaan dan implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal yang berpengaruh terhadap implementasi dana desa di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Faktor-faktor internal ini meliputi kesiapan administrasi desa dalam mengelola dana, kemampuan sumber daya manusia yang terlibat, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses implementasi dana desa di tingkat lokal.

Selain faktor internal, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor eksternal yang memengaruhi implementasi dana desa di Desa Sukosari. Faktor-faktor eksternal ini mencakup dukungan atau hambatan dari pemerintah daerah, kebijakan nasional terkait

pengelolaan dana desa, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana. Analisis terhadap faktor-faktor ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang konteks eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan di tingkat desa.

Selain mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dana desa, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis output atau hasil dari program pemberdayaan yang telah dikembangkan di Desa Sukosari. Output pemberdayaan ini dapat mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur sosial ekonomi, dan percepatan pembangunan di berbagai sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi efektivitas implementasi dana desa serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat Desa Sukosari dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan dana desa.

Manfaat penelitian ini sangat signifikan dalam beberapa aspek. Pertama-tama, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan mendalami implementasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam konteks lokal. Hasil-hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi kontribusi berharga bagi literatur ilmiah terkait kebijakan publik, pengembangan masyarakat, dan administrasi desa.

Secara praktis, penelitian ini juga memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan praktisi pembangunan. Temuan-temuan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai panduan atau dasar untuk merancang kebijakan dan program intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini penting mengingat pentingnya dana desa sebagai instrumen untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal mereka.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini juga memberikan landasan yang kokoh untuk melakukan penelitian lanjutan atau studi komparatif. Temuan-temuan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mendalami aspek-aspek lain dari implementasi dana desa di wilayah-wilayah yang berbeda atau dengan konteks yang serupa. Hal ini dapat memperluas dan memperdalam pemahaman kita tentang tantangan dan peluang dalam pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan dana desa di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi publik adalah bidang yang berkaitan dengan pengaturan dan organisasi dari proses formulasi kebijakan dan pelaksanaan program-program publik oleh pemerintah (Rahmawati, 2020). Definisi administrasi publik mencakup pengelolaan sumber daya dan koordinasi aktivitas yang dilakukan oleh sejumlah individu atau kelompok secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa administrasi publik tidak hanya melibatkan aspek manajerial dalam pengelolaan birokrasi dan implementasi kebijakan, tetapi juga menekankan pada efisiensi dan efektivitas kerja sama antarindividu dan unit organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan bagi masyarakat (Syam, 2020).

Konsep administrasi publik juga mencakup prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penggunaan sumber daya yang efisien (Resmadiktia, 2023). Dalam praktiknya, administrasi publik berperan dalam menyusun rencana, mengalokasikan anggaran, mengkoordinasikan kegiatan, dan mengevaluasi hasil dari berbagai program dan layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagai disiplin ilmu dan praktik profesional, administrasi publik juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Haning, 2018).

Menurut George Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama (Fransiska, 2022). Pertama-tama, faktor komunikasi dianggap sangat krusial dalam proses ini. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pelaksana kebijakan untuk memahami secara jelas apa yang harus dilakukan serta bagaimana tujuan dan sasaran kebijakan dapat ditransmisikan dengan baik kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang efektif tidak hanya mencakup pengiriman informasi yang tepat waktu dan akurat, tetapi juga memastikan bahwa pesan-pesan kebijakan dapat diterima dengan baik oleh penerima, sehingga meminimalkan potensi interpretasi yang salah atau ketidakpahaman.

Selain faktor komunikasi, faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah dukungan politik. Kebijakan yang diimplementasikan harus memiliki dukungan politik yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk dari para pemimpin politik, legislator, dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan politik ini tidak hanya mencakup pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik, tetapi juga proses negosiasi dan persuasi yang efektif untuk memastikan adopsi dan implementasi yang lancar dari kebijakan tersebut.

Faktor ketiga yang berperan dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan yang efektif memerlukan alokasi sumber daya yang cukup, baik itu berupa anggaran, tenaga kerja, teknologi, maupun infrastruktur pendukung lainnya. Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat memfasilitasi proses implementasi

kebijakan secara efisien dan efektif, serta mengurangi risiko terhambatnya pelaksanaan karena kendala-kendala teknis atau administratif.

Faktor keempat yang penting dalam implementasi kebijakan adalah adanya dukungan dari masyarakat atau kelompok sasaran kebijakan. Partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat atau kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan dapat memperkuat legitimasi kebijakan serta mempromosikan kepatuhan dan penerimaan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dengan melibatkan kelompok sasaran dalam proses perumusan kebijakan dan memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili dalam pelaksanaannya, kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih lancar dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dana desa merupakan sebuah inisiatif pemerintah dalam memberikan alokasi dana yang langsung diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memperkuat otonomi desa dalam mengelola sumber daya dan pembangunan di tingkat lokal. Alokasi dana desa ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, karena desa-desa yang sering kali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan infrastruktur dapat mendapatkan dukungan finansial langsung untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan.

Konsep dana desa sejalan dengan semangat desentralisasi dalam pemerintahan, yang bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik kepada tingkat yang lebih lokal dan partisipatif. Melalui alokasi dana desa, pemerintah memberikan kesempatan kepada desa-desa untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan mereka sendiri, berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal yang dimiliki. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Meinarsari, 2022).

Selain itu, dana desa juga berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan memperkuat kapasitas administratif desa dalam mengelola keuangan dan program-program pembangunan. Dengan adanya sumber dana yang lebih terjamin dan dapat diprediksi, desa-desa dapat merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana masyarakat diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam proses ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari (Lailin, 2023).

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan kemandirian, masyarakat menjadi lebih mampu mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal, melainkan dapat mengembangkan potensi dan sumber daya yang mereka miliki.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dengan kesejahteraan yang meningkat, masyarakat dapat hidup dengan lebih baik, sehat, dan sejahtera. Proses pemberdayaan ini menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan, di mana masyarakat menjadi subjek utama dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.

Administrasi publik, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan elemen yang saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Administrasi publik yang baik memastikan formulasi kebijakan yang efektif dan efisien, sementara implementasi kebijakan yang baik memerlukan komunikasi, dukungan politik, sumber daya yang memadai, dan partisipasi masyarakat. Dana desa sebagai bagian dari desentralisasi memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Seluruh proses ini menggambarkan pentingnya pendekatan holistik dan terpadu dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan deskriptif. Menurut Moleong (2011), penelitian kualitatif dilakukan secara subjektif dan alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam menggali informasi secara akurat di lapangan.

Dalam penelitian ini, penting untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan. Moleong (2006) menyatakan bahwa keabsahan data diperlukan untuk memverifikasi metode yang digunakan agar data yang diperoleh relevan dan benar . Selain itu, tahap analisis data melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menghubungkan data dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian kualitatif sebelumnya telah menunjukkan bahwa implementasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses tersebut. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan fokus khusus pada Desa Sukosari, Jember, untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut secara lebih terperinci.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Hasil penelitian mengungkap beberapa temuan krusial terkait implementasi dana desa dalam kebijakan pemberdayaan di Desa Sukosari. Salah satu faktor internal utama yang teridentifikasi adalah rendahnya kapasitas para pejabat desa, yang sering kali disebabkan oleh tingkat pendidikan yang kurang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian menyarankan perlunya penyediaan program pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi yang khusus disesuaikan untuk para pejabat desa. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam manajemen keuangan dan tata kelola, para pejabat ini dapat lebih baik mengelola dana desa dan berkontribusi secara lebih efektif pada inisiatif pengembangan masyarakat.

Temuan signifikan lainnya berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan program dana desa, yang ternyata rendah. Mengatasi tantangan ini membutuhkan upaya sosialisasi yang intensif dan penerapan insentif untuk mendorong keterlibatan aktif dari anggota masyarakat. Dengan membangun lingkungan partisipatif dan melibatkan penduduk dalam proses pengambilan keputusan, potensi untuk implementasi yang sukses dan hasil yang berkelanjutan dari proyek pengembangan desa dapat ditingkatkan secara signifikan.

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga muncul sebagai hambatan yang signifikan. Penelitian menegaskan pentingnya peningkatan keterbukaan informasi tentang alokasi dan pengeluaran dana, pembentukan mekanisme pengaduan yang efektif, serta melibatkan masyarakat dalam proses audit dan pemantauan. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan memastikan penggunaan dana desa yang tepat untuk tujuan pembangunan yang dimaksudkan.

Selain itu, pembahasan juga menekankan perlunya untuk terus meningkatkan kapasitas para pejabat desa melalui inisiatif pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi yang berkelanjutan. Meskipun sudah ada upaya untuk memberikan pelatihan yang relevan dalam manajemen dana desa, penelitian menyarankan bahwa langkah-langkah tambahan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pejabat. Dengan menginvestasikan dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan, administrasi lokal dapat mengembangkan kader pemimpin yang mampu mengelola kompleksitas tata kelola desa dan mengelola sumber daya untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menyoroti sifat multi-dimensi dari tantangan dan peluang yang melekat dalam implementasi dana desa di Desa Sukosari. Dengan mengatasi kesenjangan kapasitas internal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat membentuk lingkungan yang mendukung untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan di tingkat grassroots.

b. Pembahasan

Implementasi dana desa di Desa Sukosari menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor ini meliputi aspek pengelolaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Manajemen yang baik dari dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan efektif. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai juga menjadi penentu keberhasilan program-program ini.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukosari, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama, program pemberdayaan ekonomi harus diciptakan untuk memberikan masyarakat peluang yang lebih besar dalam mengembangkan usaha produktif. Kedua, akses pendidikan harus ditingkatkan melalui program beasiswa yang memungkinkan lebih banyak anak-anak desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, layanan kesehatan perlu ditingkatkan dengan program puskesmas keliling dan perluasan infrastruktur kesehatan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, implementasi dana desa di Desa Sukosari menunjukkan adanya potensi besar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, keberhasilan ini sangat tergantung pada kemampuan mengelola dana desa secara efektif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan Desa Sukosari dapat mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Desa Sukosari memiliki tantangan yang kompleks dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Tantangan utama terletak pada pengelolaan yang baik, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, dan infrastruktur yang layak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak eksternal yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa. Program pemberdayaan ekonomi harus dirancang secara holistik untuk menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa akan menjadi investasi jangka panjang bagi generasi muda desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Sukosari. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan melalui program puskesmas keliling dan perluasan infrastruktur kesehatan akan memastikan bahwa masyarakat desa mendapatkan akses kesehatan yang memadai.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif, Desa Sukosari dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kemajuan yang signifikan, baik potensi yang terkait dengan aspek fisik seperti sumber daya alam maupun aspek non-fisik seperti kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Implementasi dana desa yang tepat akan

membuka jalan bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan. Harapannya, Desa Sukosari bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

5. CONCLUSION

Kesimpulan dari ringkasan hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi dana desa di Desa Sukosari dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk rendahnya kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat yang rendah, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
2. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas aparatur desa diperlukan untuk memperbaiki implementasi dana desa.
3. Faktor eksternal seperti regulasi, ketersediaan dana, dukungan Pemda, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mempengaruhi implementasi dana desa.
4. Output dari implementasi dana desa di Desa Sukosari meliputi peningkatan UMKM, infrastruktur, rumah tinggal layak huni, dan bidang sosial budaya.
5. Saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi dana desa termasuk memperkuat kapasitas aparatur desa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengatasi kendala eksternal dengan meningkatkan dukungan Pemda dan alokasi dana desa.

Dari temuan tersebut, langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan termasuk peningkatan pelatihan, sosialisasi intensif, pemberian insentif, peningkatan transparansi informasi, mekanisme pengaduan yang efektif, partisipasi masyarakat dalam audit dan monitoring, peningkatan frekuensi audit dan pengawasan, penguatan kapasitas BPD, dan penerapan SOP yang jelas. Selain itu, perlu ditingkatkan pemahaman regulasi, strategi alokasi dana desa, dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah untuk mendukung implementasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

Referensi

Abdurahman, A. S. (2023). Penerapan Metode Location Quotient dalam Penentuan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Jember: Application of Location Quotient Method in Determining Leading Agricultural Commodi. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 23(1), , 92-96.

Astika. (2022). Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa

Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3599-3611.

Bonso, H. &. (2023). Analisis Implementasi Penggunaan Dana Desa di Kampung Kamorfuar Kabupaten Biak Numfor. *Sosiologis: Kajian Sosiologi Klasik, Modern dan Kontemporer*, 1(03),, 1-5.

Digdowiseiso, K. &. (2023). Studi Literatur Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Di Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 4703-4712.

El Muhammady, I. G. (2023). *Who Owns Big Data? Examine the Policies of Rural Government in Indonesia*. Dalam S. &. Asmorowati, Promoting Adaptive System to The Current Turbulence Within Crisis Environments, (hal. 298). Surabaya: Airlangga University Press.

Firdausa, Z. R. (2022). Implementasi Dana Desa dalam Pemenuhan Sarana Prasarana di Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(05), , 135-144.

Fransiska, R. A. (2022). Implementasi Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Timor Tengah Utara. . JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara).

Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 25-37.

Lailin, U. R. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi kolaboratif dalam program pemerintah daerah (Program RT Keren) di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 12(2), 1-6.

Maulana, J. S. (2022). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13242-13249.

Meinarsari, A. A. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Journal of Syntax Literate*, 7(8).

Qadafi, I. W. (2023, Juli 18). Pengembangan Kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa. Diambil kembali dari repository.unmuhjember.ac.id: http://repository.unmuhjember.ac.id/6675/1/JURNAL%20IMAM%20QADAFI%20%281610511001%29.pdf

Rahmawati, A. A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 218-231.

Resmadiktia, N. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685-697.

Rismayanti, R. (2022). Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 2(4), 160-167.

Rokhani, R. A. (2023). Optimalisasi Potensi Kuliner Desa Sukosari Kidul Melalui Pasar Lereng Raung. *Warta Pengabdian*, 17(1), 65-79.

Sihotang, F. P. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal Of Science And Social Research*, 5(3), 528-536.

Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128-152.

Yasin, H. &. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(2), 129-139.